

VIETNAM: ANTARA PEMBANGUNAN DAN PERTAHANAN

Oct. Ovy NDOUK*

Krisis perekonomian - karena berbagai hal - merupakan hambatan utama usaha pembangunan Vietnam. Sebagai akibatnya negara itu belum berkembang atau bahkan gagal mencapai kemajuan sebagaimana mestinya. Keadaan itu menjadi lebih parah lagi karena Vietnam melibatkan diri dalam konflik Indocina (Kamboja) sehingga terisolasi dari masyarakat internasional, sedangkan ia juga harus mempertahankan posisinya di kawasan itu. Vietnam memang konsekuen dengan tindakannya itu walaupun terpaksa bergantung diri pada bantuan negara lain (terutama Uni Soviet). Bantuan seperti itu diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana pembangunannya serta kelangsungan peranannya di kawasan Indocina. Akan tetapi seberapa jauh keadaan seperti ini dapat terus berlangsung kiranya akan ditentukan oleh tingkat keberhasilan pembangunan Vietnam di masa mendatang dan perkembangan (konflik) di kawasan di mana negara-negara besar (Uni Soviet dan RRC) - secara langsung maupun tak langsung - ikut memainkan peranannya. Dalam posisinya sekarang ini tampaknya agak sulit bagi Vietnam untuk menentukan apakah usaha pembangunan akan diutamakan sehingga alokasi di bidang pertahanan akan dikurangi, atau sebaliknya sehingga pembangunan akan tetap terbengkelai. Pertanyaan itu sulit dijawab oleh karena bagi Vietnam kedua hal tersebut sama pentingnya dan kait-mengkait. Tulisan ini mencoba untuk menelaah masalah yang dihadapi Vietnam itu dan tidak terlepas dari konflik Indocina.

MASALAH KEKURANGAN PANGAN

Dengan berakhirnya perang Vietnam bulan April 1975, bangsa Vietnam dapat bersatu kembali. Proses penyatuan ini didahului dengan pemilihan

*Staf CSIS.

umum yang diadakan tanggal 25 April 1976 untuk memilih anggota-anggota Majelis Nasional seluruh Vietnam. Majelis Nasional hasil Pemilu ini kemudian bersidang di Hanoi tanggal 24 Juni - 3 Juli 1976, dan mengesahkan persatuan Vietnam (Utara dan Selatan) sebagai Republik Sosialis Vietnam dengan ibukota Hanoi.¹ Penyatuan kembali itu rupanya belum membawa perdamaian bagi rakyat Vietnam, karena pada saat yang sama mereka memasuki babak perjuangan yang baru bagi negaranya. Perang yang berlangsung selama 30 tahun melawan Perancis, Amerika Serikat serta Vietnam Selatan, dan terakhir melawan RRC (Pebruari - Maret 1979), memaksa pemerintah dan rakyat Vietnam untuk bangkit dari puing-puing kehancuran dan menata kembali keadaan negaranya dalam segala bidang. Kekurangan pangan dan lapangan pekerjaan (setelah masa perang berakhir) yang menyebabkan pengangguran dan setengah pengangguran merupakan beban berat yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Vietnam. Akan tetapi sebegitu jauh segala usaha yang telah dilakukan belum mencapai hasil yang menggembirakan dan Vietnam bahkan masih harus menghadapi beberapa masalah yang cukup pelik. Di samping masih harus bertempur di Kamboja dan siap siaga menghadapi ancaman dari RRC di perbatasan utaranya, Vietnam masih menghadapi beberapa masalah dalam negeri yang serius terutama di bidang ekonomi. Berbagai sumber mengungkapkan bahwa Vietnam kini masih menghadapi kesulitan untuk memperbaiki taraf hidup rakyatnya. Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Co Tach, menggambarkan keadaan ekonomi negaranya sebagai "sangat buruk, tetapi tidak lebih buruk".² Tampaknya ia tetap optimis, terutama karena data statistik menunjukkan adanya peningkatan yang besar dalam produksi dan ekspor batu bara (lebih dari separuh ekspor komoditi Vietnam adalah batu bara). Di samping itu, ia juga berharap bahwa produksi pangan masih akan dapat ditingkatkan lagi dengan meningkatkan cara pengelolaan (dan cuaca yang baik). Dan jika ini tercapai maka untuk tahun 1982 Vietnam tidak perlu mengimpor bahan pangan lagi. Impor pangan ini merupakan masalah yang memusingkan Pemerintah Vietnam. Tahun 1976, impor pangan - beras, gandum dan tepung gandum - berjumlah 645.000 ton, dan kemudian terus meningkat setiap tahunnya (karena semakin memburuknya perekonomian Vietnam) sehingga dalam tahun 1980 mencapai 924.000 ton, tetapi tahun 1981 turun menjadi sekitar 300.000 ton.³ Menurunnya jumlah impor ini dimungkinkan oleh adanya perbaikan dalam produksi pangan. Diberitakan bahwa tahun 1981 produksi pangan mencapai target 15 juta ton. Jumlah ini 600.000 ton lebih banyak dari produksi tahun sebelumnya.⁴ Peningkatan pro-

¹Lihat *Indonesia dan Dunia Internasional 1977* (Jakarta: CSIS, April 1978), hal. 473-474.

²Lihat Michael Morrow, "Ready for a Rebound," *Far Eastern Economic Review*, 29 Januari 1982, hal. 48.

³*Ibid.*

⁴Lihat "Government Report at National Assembly," *Vietnam Courier*, Vol. 18, No. 1, 1982, hal. 3.

duksi pangan ini tampaknya memberikan harapan kepada pemerintah dan rakyat Vietnam bahwa mereka akan dapat mengatasi masalah kekurangan pangan, walaupun dengan dicapainya target tersebut di atas, produksi pangan belum mencukupi kebutuhan. Menurut laporan suatu tim dari Food and Agriculture Organization (FAO) yang mengadakan peninjauan ke Vietnam akhir tahun 1980, masalah paling besar yang dihadapi Vietnam adalah masalah pangan. Diperkirakan bahwa antara bulan Oktober 1980 dan September 1981 Vietnam mengalami kekurangan sekitar 4,4 juta ton padi atau sejenisnya (2 juta ton defisit tahunan dan 2,4 juta ton defisit tambahan akibat serangkaian angin taifun dan badai tropis yang melanda pusat panen musim gugur Vietnam yang utama). Kelaparan akan tetap melanda Vietnam jika tidak diberikan bantuan pangan yang sangat mendesak.¹ Namun pernyataan tersebut tidak ditanggapi oleh negara-negara Barat maupun negara-negara Asia Tenggara lainnya, terutama karena mereka memang tidak bersimpati terhadap Vietnam sehubungan dengan pendudukannya atas Kamboja. Oleh karenanya Vietnam harus tetap berpaling ke Moskow.

Masalah kekurangan pangan di Vietnam itu dapat diketahui juga dari laporan para pengunjung negara itu bahwa akibat bencana alam, bangsa Vietnam mengalami kekurangan pangan yang berat di seluruh negara terutama di Vietnam bagian utara. Oleh karenanya, selama tahun 1980 Pemerintah Vietnam berusaha untuk mempertahankan distribusi makanan lewat penjataan. Jatah makanan bagi penduduk yang menerima gaji di Vietnam bagian utara telah dikurangi dari 18 kg menjadi 13 kg sebulan, yang di beberapa wilayah hanya terdiri dari satu kilo beras dan 12 kilo tapioka, ubi jalar dan jagung. Di kota-kota bagian selatan yang penduduknya telah bertambah padat, jatah itu hanya tersedia bagi para pekerja dan pegawai pemerintah.² Diskriminasi pemberian jatah makanan dan kesulitan ekonomi pada umumnya merupakan sebab timbulnya ketidakpuasan, kemerosotan moral dan mengalirnya, pengungsi-pengungsi keluar dari Vietnam. Penjataan makanan seperti tersebut di atas tampaknya masih terus berlangsung dalam tahun berikutnya (1981) walaupun produksi pangan mencapai target yang telah ditentukan. Kenyataan ini membenarkan perkiraan tim FAO tersebut di atas. Menurut pengungsi asal Hanoi yang tiba di Hongkong awal Oktober 1981, jumlah jatah makanan berkisar antara 10-13 kg per bulan, tetapi hanya 30% beras, sisanya ketela pohon, tepung gandum dan bakmi. Dikatakan bahwa seorang pekerja yang tinggal di Hanoi berhak menerima kartu jatah (kupon makanan), namun mereka selalu mengeluh karena kupon makanan itu sering terlambat satu atau

¹Lihat Nayan Chanda, "A Last-minute Rescue," *Far Eastern Economic Review*, 27 Pebruari 1981, hal. 28.

²Lihat Nayan Chanda, "Vietnam's Economic Post-mortem," *Far Eastern Economic Review*, 9 Januari 1981, hal. 40.

dua bulan. Bahkan dengan kupon makanan itupun mereka harus antri untuk membeli makanan dan sering menemui kesulitan karena ulah para pedagang (calo) yang membeli (secara illegal) dan menjual kembali kupon-kupon makanan serta persediaan makanan dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹ Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan betapa sulitnya kehidupan rakyat Vietnam, sehingga tidak mengherankan bahwa banyak orang Vietnam meninggalkan negaranya untuk mencari suatu kehidupan yang lebih baik di negara lain.

KEGAGALAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Sebagai negara yang ingin membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Vietnam mengalami kesulitan untuk membangun secara wajar. Sejak penyatuan seluruh negeri, Vietnam boleh dikatakan selalu dalam keadaan darurat perang. Penyebaran pasukannya ke seluruh kawasan Indocina juga membawa konsekuensi yang berat. Kenyataannya negara itu tak pernah mempunyai kesempatan yang cukup untuk membangun perekonomiannya. Tantangan yang dihadapi cukup berat, karena pada waktu yang bersamaan perekonomian Vietnam harus dapat memenuhi tiga kebutuhan pokok yang sangat mendesak, yakni kebutuhan pertahanan nasional, kebutuhan hidup penduduk dan pembangunan basis material sosialisme tahap demi tahap. Dalam keadaan seperti ini sulit ditingkatkan pembangunannya. Untuk itu Pemerintah Vietnam harus memusatkan semua daya kemampuannya. Akan tetapi PM Pham Van Dong mengakui bahwa dalam masa dekat ini pembangunan mungkin tidak akan dapat berjalan dengan cepat akibat kemiskinan dan keterbelakangan perekonomian nasional Vietnam. Hal itu antara lain adalah akibat perang yang lama, sabotase yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan RRC, dan bencana alam yang sering melanda Vietnam. Ditambahkannya bahwa faktor lain yang juga menghambat lajunya pembangunan itu adalah kekurangan pengalaman mereka di bidang manajemen ekonomi.² Dengan kata lain, PM Vietnam itu mengakui kegagalan pembangunan ekonomi negaranya. Selain itu dapat disebutkan penyimpangan struktural yang telah berlangsung lama dan kekurangan prasarana serta tidak cukupnya akumulasi modal yang menjadi sifat dari sebagian besar negara yang sedang berkembang. Tambahan pula, birokrasi yang kaku dan organisasi yang kurang baik (sejak 1975) telah memperburuk perekonomian Vietnam.³ Sekjen

¹Lihat Ton Long, "The Phe Phay's Prey," *Far Eastern Economic Review*, 16 Oktober 1981, hal. 23.

²Lihat Sabam Siagian, "Belum pernah kami sekuat seperti sekarang ..." (wawancara dengan PM Pham Van Dong), *Sinar Harapan*, 10 Nopember 1981, hal. V.

³Lihat Ng Shui Meng, "Vietnam in 1980: The Challenge of Isolation," *Southeast Asia Affairs* 1981, hal. 344.

Partai Komunis Vietnam (PKV), Le Duan, (yang terpilih kembali sebagai Sekjen PKV) dalam laporannya pada Kongres ke-5 Partai Komunis Vietnam yang berlangsung akhir Maret 1982, mengakui bahwa kekurangan-kekurangan dan kekeliruan-kekeliruan dalam kepemimpinan telah memperburuk masalah ekonomi dan sosial Vietnam.¹ Hal ini merupakan salah satu sebab gagalnya rencana pembangunan lima tahun kedua (1976-1980). Hasil dari pelaksanaan Repelita itu tidak mengurangi ketidakseimbangan yang serius dalam perekonomian nasional. Produksi nasional tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat rata-rata 2,6% setahun (berdasarkan sensus bulan Oktober 1979).

Pertanian menempati kedudukan yang dominan dalam perekonomian Vietnam. Sekitar 80% dari seluruh penduduk bekerja di bidang pertanian terutama di sawah. Akan tetapi karena berbagai hal maka bidang pertanian ini belum mampu mendukung perekonomian nasional. Selain bencana alam, dapat disebutkan usaha Pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses sosialisasi di wilayah Vietnam bagian selatan dan kebijaksanaan kolektif yang kaku di Vietnam bagian utara. Di Delta Mekong yang kaya, para petani seringkali dipaksa untuk bekerja secara kolektif. Akibatnya, areal tanah yang diolah dan ditanami menjadi berkurang (karena mereka enggan untuk mengerjakannya) dan dalam banyak hal para petani menjual atau memotong ternak-ternak mereka untuk menghindari pengkolektifan. Selain itu mereka juga mengelakkan kewajibannya untuk membayar pajak pertanian dan menghindari penjualan surplus padinya kepada negara dengan harga rendah. Oleh karenanya, dalam tahun 1979 pemerintah hanya dapat mengumpulkan 40% dari target surplus pangan Vietnam bagian selatan, sedangkan di Vietnam bagian utara, koperasi pertanian enggan untuk memenuhi kewajiban mereka kepada pemerintah.² Kenyataan ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan pemerintah itu kurang mendapatkan dukungan terutama dari para petani di Vietnam bagian selatan. Kebijaksanaan Pemerintah Vietnam untuk mempercepat proses sosialisasi itu tampaknya masih sulit untuk diterima oleh penduduk di Vietnam bagian selatan yang sebelumnya serba liberal (karena pengaruh kehadiran Amerika Serikat). Hal ini juga merupakan salah satu sebab mengalirnya orang-orang perahu (pengungsi) dari Vietnam ke negara-negara sekitarnya. Tindakan Pemerintah Vietnam yang menutup semua uaha swasta di Vietnam bagian selatan pada bulan Maret 1978 (yang sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Cina atau Vietnam keturunan Cina) menyebabkan ratusan ribu orang Cina atau Vietnam keturunan Cina melarikan diri ke negara-negara tetangga Asia Tenggara atau ke RRC (sekitar 70% di antaranya terdiri dari pengusaha menengah, ahli teknik atau bekas pejabat rezim lama).

¹Lihat *Suara Karya*, 2 April 1982.

²Lihat Nayan Chanda, "Vietnam's Economic Post-mortem," *Far Eastern Economic Review*, 9 Januari 1981, hal. 40.

Hal yang sama terjadi juga di Vietnam bagian utara. Akibat kepergian orang-orang Cina ini Vietnam kehilangan tenaga kerja trampil dan tenaga ahli, sehingga produksi di bidang industri menurun. Di samping itu, tindakan Pemerintah Vietnam tersebut merupakan salah satu sebab pertentangannya dengan RRC. Dan ketika Vietnam menyerang Kamboja, RRC menarik semua ahlinya yang bekerja di Vietnam dan menghentikan bantuan proyeknya di sana. Hal ini semakin menyulitkan Vietnam.

Perang dan keadaan tak menentu selama masa rezim lama di Vietnam bagian selatan telah menyebabkan banyak penduduk desa meninggalkan kampung halamannya menuju kota. Sehubungan dengan menumpuknya penduduk di kota-kota tanpa lapangan pekerjaan yang pasti itu timbul masalah pengangguran dan masalah sosial lainnya. Untuk mengatasi masalah ini Pemerintah Vietnam mengambil langkah-langkah antara lain memberikan kebebasan kepada orang-orang asal desa untuk kembali ke desanya dan menggarap kembali tanah yang dulu ditinggalkannya. Selain itu pemerintah membuka daerah pertanian baru yang dinamakannya "Daerah Ekonomi Baru" (New Economic Zone) untuk menyalurkan penganggur dari kota ke kegiatan yang produktif. Sebagian besar mereka yang ditempatkan di Daerah Ekonomi Baru ini berasal dari Ho Chie Minh City (Saigon) dan kota-kota besar lainnya di Vietnam bagian selatan. Antara tahun 1975 dan 1979, sekitar 1,3 juta penduduk dipindahkan ke Daerah Ekonomi Baru tersebut. Pembentukan Daerah Ekonomi Baru ini sebenarnya merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian. Akan tetapi kebijaksanaan ini kurang mendapat dukungan terutama dari penduduk di kota-kota Vietnam bagian selatan yang kekurangan pengetahuan dan pengalaman bertani. Di samping itu, kurangnya persiapan, prasarana, alat-alat, benih dan obat-obatan telah mempersulit masalah yang mereka hadapi. Kesulitan kehidupan di Daerah Ekonomi Baru itu menyebabkan mereka yang dikirim kesana kembali lagi ke kota atau desa asalnya. Kegagalan program ini merupakan salah satu sebab tidak tercapainya target produksi pertanian. Antara tahun 1975 dan 1979 produksi pangan hanya meningkat dari 11,6 juta ton menjadi 13,8 juta ton atau hanya 19%. Dan tahun 1980, karena cuaca yang merugikan, produksi pangan tidak mencapai target (15 juta ton), sedangkan produksi komoditi lainnya juga tidak meningkat dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.¹

USAHA PERBAIKAN

Kongres ke-4 Partai Komunis Vietnam (akhir tahun 1976) telah menetapkan rencana pembangunan lima tahun kedua negara itu (1976-1980) yang

¹Lihat Ng Shui Meng, *loc. cit.*, hal. 345; lihat juga Ton Long, "Escape Into Laughter," *Far Eastern Economic Review*, 6 Nopember 1981, hal. 47.

menitikberatkan usaha-usaha pembangunan kembali Vietnam dengan cara mengembangkan pertanian dan cabang industri yang bertalian dengan pertanian. Akan tetapi, seperti diakui pemerintah, rencana pembangunan itu gagal, terutama karena pembangunan sektor pertanian tidak mencapai targetnya. Para pemimpin Vietnam yang diliputi suasana optimis rupanya mengharapkan suatu "lompatan" dalam pembangunan pertaniannya dan menetapkan target swasembada pangan pada akhir tahun 1980 dengan produksi 21 juta ton padi. Akan tetapi setelah tiga kali berturut-turut panen gagal akibat bencana alam, target tersebut dikurangi menjadi 15 juta ton walaupun kenyataannya target ini juga tidak tercapai. Perbaikan dalam bidang produksi pangan tampaknya baru tercapai pada tahun 1981, dalam arti bahwa produksi pangan mencapai target (15 juta ton), namun hal itu tidak berarti bahwa Vietnam telah keluar dari lingkaran kesulitan perekonomiannya, oleh karena - sebagaimana disebutkan di muka - secara keseluruhan masih terdapat kekurangan pangan. Peningkatan produksi pangan ini terutama dicapai karena pemerintah memperkenalkan sistem pembayaran yang memungkinkan anggota komune untuk menjual kelebihan produksi mereka di pasaran bebas. Sistem ini dikenal dengan nama "Khoan". Sebelumnya khoan ini sangat dikecam oleh pemerintah, namun karena keadaan memaksa dan para petani tampaknya kurang bergairah dengan pekerjaan mereka - yang mengakibatkan kurangnya produksi pangan - sistem ini mulai diperkenalkan,¹ sebagai rangsangan bagi para petani untuk meningkatkan produksi. Ini juga berarti memberikan kebebasan kepada individu untuk berinisiatif dan menggunakan pasar bebas, walaupun hal itu sebenarnya tidak sesuai dengan pembangunan sosialisme yang sedang giat dilakukan Vietnam. Dengan kata lain, terdapat unsur perubahan sistem perekonomian menuju ekonomi pragmatis. Yang menjadi masalah adalah bagaimana mengembangkan perekonomian itu lebih lanjut. Investasi di bidang tertentu mungkin akan memberikan jawaban, namun mungkin agak sulit bagi Pemerintah Vietnam untuk mengusahakannya (terutama sehubungan dengan konflik Indocina). Di samping itu harus diperhitungkan bagaimana pengaruh sistem perekonomian tersebut terhadap kebijaksanaan pemerintah untuk membangun sosialisme dan mempertahankannya secara gigit suatu Vietnam yang sosialis.

Selain sektor pertanian, sektor industri juga mengalami kesulitan, bahkan kurang berkembang daripada sektor pertanian. Produksi barang-barang kebutuhan pokok rakyat sulit untuk dikembangkan terutama karena kurangnya bahan-bahan mentah dan perencanaan yang kurang realistis. Tidak cukupnya cadangan devisa memaksa Pemerintah Vietnam menempuh kebijaksanaan pembatasan impor yang ketat terhadap semua jenis barang sehingga output industri terpengaruh.

¹Lihat *Kompas*, 27 Maret 1982.

Perbaikan di sektor industri mulai tampak pada tahun 1981, setelah diperkenalkan sistem upah borongan. Industri ringan diprioritaskan, terutama industri barang-barang kebutuhan pokok dalam rangka memperbaiki kondisi hidup rakyat. Industri kecil seperti kerajinan yang berbentuk koperasi, juga menjalankan sistem perangsang (insentif), dengan membayar upah lebih besar kepada mereka yang menghasilkan lebih banyak. Dengan demikian Vietnam berharap akan dapat meningkatkan produksi. Persoalannya adalah apakah dengan memberikan rangsangan material itu kebijaksanaan Pemerintah Vietnam telah menjurus ke arah revisionis (atau kapitalis)? Pimpinan Komisi Perencanaan Negara, Nguyen Lam, menegaskan: "Hal itu bukan revisionis. Kami hanya menghargai tiga kepentingan, yaitu negara, kolektif dan perorangan. Satu hal yang kami kritik adalah birokrasi dan sistem di mana pusat mengontrol segala sesuatunya. Hal ini tidak memberikan peluang kepada pekerja untuk berkreasi. Sekarang kami melancarkan kampanye anti birokrasi besar-besaran. Hal ini disambut baik oleh sebagian besar rakyat, pekerja dan kader partai. Tentu saja, ada beberapa pihak yang konservatif, sedikit sekali, yang berpendapat bahwa insentif material tersebut tidak baik".¹

Tampaknya kebijaksanaan Pemerintah Vietnam tersebut di atas (baik pertanian maupun industri) secara perlahan telah membawa hasil berupa peningkatan produksi, walaupun masih dihadapi masalah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok, sementara gaji belum lagi dinaikkan, sedangkan korupsi masih merajalela. Masalah-masalah itu masih cukup sulit untuk segera diatasi sebelum keadaan perekonomian negara diperbaiki. Peningkatan produksi pertanian mungkin bisa memberikan harapan, di samping perbaikan ekspor komoditi lainnya.

Kongres ke-5 Partai Komunis Vietnam telah pula menerima dan mengumumkan sejumlah langkah di bidang perekonomian, termasuk melawan birokratisme, menghapus sistem subsidi negara bagi kaum pekerja dan mendesentralisasi pengambilan keputusan di dalam manajemen.² Keputusan Kongres ini merupakan pembenaran terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan perekonomian yang telah dijalankan dalam tahun-tahun terakhir ini. Akan tetapi gambaran tentang perekonomian Vietnam di masa mendatang kiranya akan ditentukan oleh rencana pembangunan negara itu. Kongres juga telah memutuskan bahwa kepemimpinan baru partai dan pemerintah akan menyusun rencana pembangunan lima tahun (1981-1985) dan mempersiapkan rencana-rencana berikutnya dengan mengadakan tindakan politik yang efektif guna memecahkan masalah-masalah yang dihadapi

¹Lihat Nayan Chanda, "Planning for Prosperity - Without Revisionism," (interview/Nguyen Lam), *Far Eastern Economic Review*, 27 Februari 1981, hal. 33.

²Lihat *Sinar Harapan*, 1 April 1982.

produksi dan kehidupan rakyat.¹ Ada kemungkinan bahwa dengan terpilihnya kembali Le Duan dan Pham Van Dong akan dilanjutkan langkah-langkah menuju liberalisasi ekonomi dan insentififikasi perorangan di dalam kerangka sosialisme. Slogan baru yang muncul di Vietnam adalah "Egalitarianisme mendorong kelambanan dan rasa tidak bertanggung jawab," sedangkan sosialisme tidak dipersoalkan lagi. Yang harus diperhitungkan adalah tiga kepentingan² sebagaimana disebutkan di bagian muka tulisan ini. Akan tetapi masih sulit untuk mengatakan apakah kebijaksanaan yang kini dijalankan pemerintah sosialis Vietnam (pemberian insentif material, desentralisasi, dan lain-lain) dicanangkan sebagai suatu alternatif bagi suatu kebijaksanaan sentralisasi dan egalitarian sosialisme atau apakah kebijakan itu hanya bersifat sementara dan digunakan untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang ini. Karena Vietnam ingin membangun sosialisme mungkin yang terakhir itulah yang benar karena dorongan terhadap tekanan ideologi dan organisasi partai tampaknya masih akan dilanjutkan. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa Vietnam akan menjurus ke arah revisionisme atau kapitalisme sebagaimana disebutkan Nguyen Lam. Perkembangan selanjutnya mungkin masih akan ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah Vietnam yang digariskan dalam rencana pembangunan lima tahun ketiga.

KONSOLIDASI KEAMANAN

Para pengamat luar negeri sering menggambarkan krisis ekonomi Vietnam sekarang ini sebagai akibat konfliknya dengan Cina dan usaha-usahanya untuk mendominasi Kamboja dan Laos. Hal ini mungkin bisa dibenarkan. Untuk peranannya di Indocina termasuk konfliknya dengan Cina itu Vietnam harus mengalihkan sumber-sumber dayanya ke sektor pertahanan (diperkirakan lebih dari 50% dari anggaran belanja). Dan sebagai akibat peranannya di kawasan itu, Vietnam terisolasi dari masyarakat internasional dan proses pembangunan ekonominya terhambat. Akan tetapi, tanpa militerisasi pun di mana sebagian besar dari anggaran pembangunannya dialihkan untuk pertahanan, Vietnam akan mengalami krisis ekonomi (terutama kekurangan pangan), antara lain sebagai akibat perang yang lama, bencana alam maupun kurangnya perencanaan dan pengaturan dalam membangun perekonomiannya.

Lambatnya proses pembangunan di Vietnam tampaknya berkaitan dengan persepsinya mengenai ancaman dari luar terhadap keamanan nasionalnya. Hal inilah yang menyebabkan para pemimpin Vietnam (berhaluan keras)

¹ Lihat *Suara Karya*, 2 April 1982.

² Lihat, *Kompas*, 27 Maret 1982.

selama ini mengkaitkan perekonomiannya dengan semangat untuk menghadapi musuh dari luar. Ekonomi yang mereka serukan adalah ekonomi perang, walaupun musuh dari luar yang sejauh ini berulang kali disebut adalah Cina. Oleh karenanya tidak mengherankan jika Vietnam mengalihkan lebih dari separuh anggarannya untuk pertahanan nasional.

Bermula dari konflik perbatasannya dengan Kamboja, Vietnam rupanya merasa bahwa jika keadaan itu dibiarkan berlarut, maka perbatasan baratnya tidak akan aman dan hal ini akan mempengaruhi integrasi Vietnam bagian selatan yang tampaknya jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Dan yang lebih penting lagi bagi Vietnam adalah bahwa di belakang ancaman keamanan dari perbatasan baratnya itu adalah Cina yang mendukung rezim Pol Pot dan Ieng Sary yang pada saat itu berkuasa di Kamboja. Oleh karenanya Vietnam pada akhir tahun 1978 menyerbu Kamboja untuk menggulingkan pemerintahan rezim Pol Pot dan Ieng Sary. Secara demikian Vietnam juga berusaha menyelesaikan permusuhan historisnya dengan bangsa Khmer (Kamboja). Heng Samrin kemudian ditempatkan sebagai pemimpin pemerintah baru di Kamboja. Dan untuk mengamankan kedudukan Heng Samrin itu Vietnam menempatkan sekitar 200.000 tentaranya di Kamboja. Tampaknya kehadiran tentara Vietnam di Kamboja itu masih akan dipertahankan, karena membiarkan rezim Khmer Merah yang pro-Cina merebut kembali kekuasaan di Kamboja akan berarti membiarkan adanya ancaman terhadap keamanan nasional Vietnam. Dengan alasan yang sama Vietnam menempatkan sekitar 40-50 ribu tentaranya di Laos terutama di wilayah bagian utara yang berbatasan dengan RRC.

Insiden-insiden perbatasan dan pembebasan rakyat Kamboja yang tertindas oleh Pemerintah Pol Pot, merupakan salah satu alasan bagi Vietnam untuk menyerbu Kamboja dan menggulingkan Pemerintah Pol Pot dan Ieng Sary. Secara ekonomis, Kamboja mungkin bisa diharapkan membantu pengadaan pangan Vietnam (Kamboja bagian timur yang berbatasan dengan Vietnam merupakan gudang beras sebelum masa perang). Namun di samping itu, Vietnam kiranya menghendaki sesuatu lain dari Kamboja yang merupakan salah satu dari negara-negara Indocina. Terlepas dari cita-cita yang diturunkan oleh "paman" Ho Chie Minh (pembentukan Federasi Indocina), Vietnam membutuhkan suatu hubungan khusus dengan Kamboja (maupun Laos) untuk memantapkan keamanannya di kawasan Indocina terhadap bahaya ancaman dari luar (terutama dari RRC). Akan tetapi berbeda dengan Laos, Pemerintah Pol Pot di Kamboja menolak penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karenanya perang merupakan satu-satunya cara bagi Vietnam untuk membuat bangsa Khmer menjalin hubungan khusus semacam itu. Sesuai dengan itu Vietnam menyerbu Kamboja, mengangkat Pemerintah Heng Samrin dan menandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama

dengan pemerintah baru Kamboja itu (Pebruari 1979). Perjanjian serupa itu telah ditandatangani dengan Laos (Juli 1977). Dengan demikian untuk sementara ini dapat dikatakan bahwa Vietnam telah berhasil mengkonsolidasikan keamanannya di kawasan Indocina terhadap ancaman dari luar, walaupun sampai kini ia belum berhasil menyapu bersih kekuatan Khmer Merah di Kamboja. Hubungan khusus dengan kedua negara tersebut di atas itu rupanya akan tetap dipertahankan oleh Vietnam, seperti terungkap dalam pernyataan Ketua Dewan Negara, Truong Chinh, kepada Majelis Nasional akhir Desember 1980, bahwa betapapun sulitnya keadaan ekonomi dan kehidupan sehari-hari mereka, mereka harus meningkatkan kemampuan pertahanannya untuk membela tanah air dan memenuhi kewajiban internasional mereka, terutama terhadap Laos dan Kamboja.¹ Pernyataan Truong Chinh itu secara tak langsung juga mengakui beratnya beban yang ditanggung Vietnam, baik akibat hubungan khususnya dengan kedua negara itu (terutama biaya perang di Kamboja) maupun karena peningkatan biaya pertahanan. Akibatnya, perekonomian Vietnam tidak berkembang walaupun Uni Soviet memberikan bantuan sekitar 3-6 juta dollar sehari untuk membiayai pendudukan Vietnam di Kamboja. Meskipun demikian, Pemerintah Vietnam tampaknya menerima kenyataan itu.

Untuk menunjang usahanya memantapkan keamanan nasionalnya, Pemerintah Vietnam mengharuskan rakyatnya untuk selalu siap-siaga agar setiap waktu dapat mengangkat senjata. Latihan militer dilakukan secara intensif. Sejalan dengan kebijaksanaannya itu Pemerintah Vietnam juga selalu mengingatkan rakyatnya akan adanya ancaman dari luar (terutama dari RRC) terhadap eksistensi mereka. Perang perbatasan dengan RRC (Pebruari-Maret 1979) merupakan salah satu bukti adanya ancaman itu. Oleh karenanya kesiapsiagaan perlu ditingkatkan ditengah pergulatannya mengatasi kesulitan di bidang perekonomian. Ancaman dari RRC masih merupakan momok yang perlu diperhitungkan oleh karena sewaktu-waktu bisa datang "pelajaran kedua" terhadap Vietnam.

KEHADIRAN VIETNAM DI KAMBOJA

Tampaknya kehadiran tentara Vietnam di Kamboja dikaitkan juga dengan ancaman dari RRC. Demikianpun usaha Vietnam untuk mempertahankan hubungan khusus dengan Kamboja (dan Laos). Tetapi hal itu mempersulit penyelesaian masalah Kamboja. Pemerintah Vietnam telah berulang kali mengatakan bahwa keterlibatan militernya di Kamboja akan berakhir jika

¹Lihat Nayan Chanda, "An Ideologue in Charge," *Far Eastern Economic Review*, 10 Juli 1981, hal. 16.

RRC tidak lagi merupakan ancaman bagi keamanan Vietnam. Penolakan Vietnam untuk menarik mundur seluruh pasukannya dari Kamboja itu tidak terlepas dari ancaman laten Cina tersebut. Konkritnya, Vietnam ingin agar RRC menghentikan bantuannya kepada rezim Pol Pot (Khmer Merah) dan kelompok reaksioner Khmer lainnya; menghentikan provokasi bersenjata serta tekanan militernya di sepanjang perbatasan Vietnam dan Laos; melanjutkan perundingan dengan Vietnam untuk menyelesaikan beberapa masalah yang menyangkut hubungan antara kedua negara, menandatangani perjanjian nonagresi dan koeksistensi damai dengan ketiga negara Indocina.¹ Sejauh mana pernyataan Vietnam tersebut di atas bisa dipercaya masih harus dibuktikannya. Namun sulit untuk mengatakan bahwa RRC akan menerima persyaratan Vietnam itu (kecuali mungkin perundingan bilateral), karena RRC juga mempunyai kepentingan di Kamboja, terutama setelah Vietnam semakin dekat dengan Uni Soviet, yang dianggapnya sebagai ancaman paling besar bagi keamanannya. Seandainya RRC setuju untuk menghentikan bantuannya kepada rezim Khmer Merah, maka hal itu akan berarti membiarkan Vietnam yang didukung Uni Soviet mendominasi kawasan Indocina secara mutlak. Hal ini berarti juga membiarkan Uni Soviet mengepung wilayah RRC tidak hanya dari perbatasan bersama mereka di bagian utara dan barat tetapi juga dari arah selatan. Provokasi bersenjata dan tekanan militer yang dilakukan Cina di sepanjang perbatasannya dengan Vietnam (dan Laos) dimaksudkan untuk mengalihkan sebagian tekanan Vietnam terhadap kelompok Khmer Merah di Kamboja. Dengan cara demikian Cina mengharapkan dapat memperlambat usaha Vietnam untuk menumpas sisa-sisa tentara Khmer Merah yang kini terdesak ke Kamboja bagian barat di sepanjang perbatasan dengan Muangthai. Hal ini berarti bahwa RRC masih mempunyai kesempatan untuk memulihkan kekuasaan rezim Khmer Merah. Akan tetapi sampai berapa lama keadaan seperti ini dapat dipertahankan, tergantung dari sikap mereka karena masalah Kamboja sebenarnya merupakan masalah antara RRC dan Vietnam (yang didukung Uni Soviet). Hal ini tidak berarti bahwa usaha penyelesaian yang dilakukan pihak lain seperti ASEAN tidak berguna, namun usaha seperti itu sulit mencapai hasil yang diharapkan kalau pihak-pihak yang bersengketa tidak ikut serta. Sementara itu RRC juga tidak akan bersedia menandatangani perjanjian nonagresi dan koeksistensi damai dengan ketiga negara Indocina, karena hal itu akan berarti bahwa secara tak langsung ia mengakui adanya (Federasi) Indocina yang menempatkan Kamboja dan Laos di bawah proteksi Vietnam. Tetapi RRC menentang hal itu terutama karena Vietnam adalah sekutu Uni Soviet. RRC tidak menghendaki adanya Federasi Indocina atau apapun namanya di bawah Vietnam, karena hal itu akan berarti membiarkan Uni Soviet mendapatkan tempat berpijak yang kuat

¹Lihat Sabam Siagian, *loc. cit.*, hal. VII; lihat juga Michael Morrow, "A State of Balance," (interview/Nguyen Co Thach), *Far Eastern Economic Review*, 29 Januari 1982, hal. 16.

untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara umumnya. Ketidaksenangan RRC itu telah dibuktikannya antara lain dengan penyerbuannya ke Vietnam bulan Pebruari 1979.

PENUTUP

Sampai kini Vietnam terpaksa menanggung konsekuensi intervensi militernya di Kamboja berupa bertambah beratnya beban ekonominya dan terhambatnya pembangunannya. Akibat tindakannya itu pula Vietnam menjadi terisolasi dari masyarakat internasional dan banyak negara maupun badan bantuan internasional membatalkan, menghentikan atau menunda bantuannya sampai Vietnam bersedia menarik kembali pasukannya dari Kamboja. Hal ini merupakan salah satu sebab macetnya perekonomian Vietnam, karena Vietnam pada dasarnya belum mampu untuk membangun secara mandiri. Keadaan ini dipersulit lagi oleh cuaca yang tidak menguntungkan (bencana alam), kemerosotan moral, korupsi maupun pengaturan dan perencanaan yang kurang realistis. Untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan pembangunan di dalam negerinya, Vietnam harus memperluas jaringan hubungan perdagangan luar negerinya dan menerima bantuan ekonomi internasional. Namun selama masalah Kamboja belum diselesaikan, maka selama itu pula sulit bagi Vietnam untuk melakukan hal-hal tersebut. Oleh karenanya Vietnam mau tak mau harus tetap bergantung pada bantuan negara-negara blok sosialis terutama Uni Soviet. Usaha Vietnam untuk memperluas hubungan luar negerinya dengan negara-negara Barat masih terbatas jumlahnya dan sebagian besar bantuan yang diterimanya dari mereka adalah bantuan kemanusiaan, walaupun ada juga yang mulai membantu pembangunan di Vietnam (antara lain Perancis, Belgia, Belanda, Swedia, India, dan berbagai badan PBB khususnya FAO dan UNICEF). Namun Pemerintah Vietnam tampaknya tetap mempertahankan posisinya di kawasan Indocina dan bersedia untuk menerima kenyataan. Bagi Vietnam rupanya masalah pertahanan nasional, integritas negara-negara Indocina dan pembangunan ekonomi adalah sama pentingnya. Ancaman terhadap keamanan nasionalnya dianggap sebagai ancaman terhadap keutuhan seluruh kawasan Indocina. Dan ancaman itu masih saja didengungkan sehingga mobilisasi masih perlu dilakukan. Konsekuensinya adalah bahwa pengeluaran sektor pertahanan tetap tinggi sementara pembangunan harus mengalah sehingga rakyat Vietnam masih harus menunggu lebih lama lagi untuk dapat menikmati hasil pembangunan Vietnam. Sampai kapan keadaan seperti ini akan dipertahankan masih sulit diketahui. Bergantung pada penguasa Vietnam, apakah perekonomian yang akan dilaksanakan masih merupakan ekonomi perang atau apakah dalam melaksanakan rencana pembangunan tahap ketiga pembangunan

ekonomi akan diutamakan sehingga anggaran sektor pertahanan akan dikurangi. Hal ini banyak bergantung juga pada persepsi Vietnam mengenai ancaman (RRC) terhadap keamanan nasionalnya, yaitu apakah RRC masih dianggap sebagai musuh utama yang ekspansionis dan hegemonis, sehingga kesiapsiagaan masih diperlukan. Jawabannya akan banyak berpengaruh pada proses penyelesaian masalah Kamboja, karena apa yang dilakukannya terhadap Kamboja merupakan salah satu bagian strateginya untuk menangkal politik ekspansionis dan hegemonis RRC di Asia Tenggara dan politik permusuhannya dengan Vietnam.